

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan perpajakan bagi negara adalah hal yang terpenting dalam mendanai jalannya negara Indonesia merupakan negara yang pendapatannya sangat bergantung dengan pendapatan dari pajak pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.518,8 Triliun dari pendapatan total negara sebesar Rp 1.943,4 Triliun dari pendapatan pajak saja sudah memenuhi 78,2 % dari pendapatan negara sedangkan belanja negara pada tahun yang sama sebesar Rp. 2.213,1 Triliun, pendapatan pajak memenuhi 68,6 % dari belanja negara, sehingga pendapatan perpajakan adalah pendapatan yang memiliki kontribusi yang paling besar bagi Indonesia. Pendapatan perpajakan yang digunakan untuk diukur secara umum antara lain : pajak penghasilan individu dan perusahaan, pajak pertambahan nilai, pajak untuk jasa dan barang, pajak yang berhubungan dengan kepentingan sosial, dan pajak – pajak lainnya yang tidak dikategorikan dalam pajak diatas.

Pertumbuhan pendapatan pajak dipengaruhi oleh para ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam teori *displacement effect* yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (Peacock & Wiseman, 1961) menyatakan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin rendah keinginan masyarakat untuk membayar pajak hal ini dikarenakan masyarakat memiliki toleransi tertentu untuk membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paresh Kumar Narayan (Narayan, 2004) bahwa tidak terdapat hubungan antara pengeluaran atau belanja dari pemerintah terhadap pendapatan pajak negara, begitu pula dengan penelitian dari Ridha Elvianti (Elvianti, 2017), namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Roshaliza Taha (Taha & Loganathan, 2008) bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak pemerintah.

Dalam mengukur kinerja anggaran maka dapat digunakan analisis Varians anggaran yang melakukan analisis terhdap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran yang disajikan, perbedaan ini yang menunjukkan adanya jarak antara target dengan hasil dari perbedaan ini dapat diukur efisiensi dalam menggunakan anggaran atau merencanakan anggaran, dikarenakan dalam menganggarkan diwajibkan untuk sedekat mungkin dengan

realisasinya sehingga tidak ada anggaran yang tidak terserap. Bentuk dari analisis Varians Anggaran ada dua macam yaitu Varians Anggaran Belanja dan Varians Anggaran Pendapatan, dalam penelitian ini akan difokuskan pada Varians Anggaran Belanja KPP yang tujuannya adalah untuk mengukur seberapa efektifnya penyerapan dari anggaran tersebut terhadap realisasinya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitri Irka Wahyu Niansyah (Niansyah & Biswan, 2018) terhadap KPP Badan dan Orang Asing, dan menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendra Triantoro dan Bambang Subroto (Triantoro & Subroto, 2016), bahwa belanja KPP dan jumlah Account Representative menjadi variabel yang mempengaruhi jumlah penerimaan pajak yang terealisasi.

Government spending/Expenditure adalah Pengeluaran Pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan pemerintahan yang dalam hal ini bisa berarti sebagai belanja negara/pemerintah, dimana sumber pengeluaran pemerintah ini adalah APBN yang bersumber dari pendapatan pajak, penerimaan negara bukan pajak, pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. APBN juga merupakan sumber anggaran dari pemerintah daerah untuk mendanai APBD maka, setiap kegiatan pemerintah di daerah juga bersumber dari pendapatan pajak negara, pada tahun 2018 rata – rata ketergantungan daerah terhadap pembiayaan APBN adalah 80,1% dan hanya 12,87% dari pendapatan asli daerah (PAD) (Hidayat & Olivia, 2018). Dalam teori *displacement effect* yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman (Peacock & Wiseman, 1961) menyatakan bahwa semakin besar pengeluaran pemerintah maka akan semakin rendah keinginan masyarakat untuk membayar pajak hal ini dikarenakan masyarakat memiliki toleransi tertentu untuk membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paresh Kumar Narayan (Narayan, 2004) bahwa tidak terdapat hubungan antara pengeluaran atau belanja dari pemerintah terhadap pendapatan pajak negara, begitu pula dengan penelitian dari Ridha Elvianti (Elvianti, 2017), namun sebaliknya pada penelitian yang dilakukan oleh Roshaliza Taha (Taha & Loganathan, 2008) bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan pajak pemerintah.

Pendapatan pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah pendapatan perkapita, pendapatan perkapita merupakan besarnya rata – rata pendapatan penduduk di suatu daerah/negara, apabila pendapatan perkapita semakin tinggi maka rata – rata daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi, yang akan menyebabkan perputaran barang atau jasa

juga semakin besar, yang nantinya akan berefek pada pendapatan pajak negara, menurut studi yang dilakukan oleh Phany Ineke Putri (Putri, 2013) bahwa pendapatan perkapita memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, namun sebaliknya menurut penelitian yang dilakukan oleh Danny Wibowo (Wibowo, 2015) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh peningkatan pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak reklame di daerah.

Menurut Fuad Rahmany pendapatan pajak Indonesia rendah ini dikarenakan semakin besarnya potensi pajak yang dapat dipungut dikarenakan semakin membesarnya perkembangan ekonomi Indonesia dan hal tersebut tidak disertai dengan penguatan kapasitas dari Ditjen Pajak (Gumiwang, 2014), selain itu dengan meningkatnya pendapatan perkapita dari masyarakat maka pendapatan pajak juga meningkat hal ini dikarenakan semakin meningkatnya pendapatan perkapita maka semakin menguatnya konsumsi dan pendapatan maka pendapatan pajak juga semakin membesar, namun pertumbuhan pendapatan pajak tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan perkapita, hal tersebut yang menjadi alasan/latar belakang dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *general government spending* di daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP ?
2. Apakah pendapatan perkapita daerah berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP ?
3. Apakah analisis varians belanja KPP berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh *general government spending* di daerah terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh pendapatan per kapita daerah terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh varians belanja KPP terhadap Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis adalah untuk menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya di masa depan
2. Manfaat praktis adalah untuk memberikan masukan pada pemerintah untuk meningkatkan kinerja perpajakan sehingga dapat meningkatkan Pendapatan pajak

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah *general government spending* di daerah di Indonesia, jumlah pegawai KPP di daerah, analisis varians anggaran belanja pada laporan keuangan KPP di daerah, serta Efektivitas Pendapatan Pajak Di KPP.

